

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tinjauan pustaka akan menyajikan uraian mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya serta konsep dan teori yang relevan dengan fokus kajian ini, dengan menyoroti lima penelitian yang memiliki tingkat kemiripan tinggi namun tetap menunjukkan perbedaan dalam aspek konseptual, teoretis, maupun temuan empiris;

Literatur pertama yang paling dekat dengan penelitian ini adalah artikel Simon Matti, Karin Bäckstrand, dan Mikael Miljand pada tahun 2024 berjudul *Sweden's Climate Policy Framework and Political Transitions in Climate Governance*. Mereka membahas bagaimana perubahan komposisi pemerintahan dari koalisi sayap kiri ke sayap kanan memengaruhi konsistensi pelaksanaan *Climate Policy Framework* setelah diberlakukannya *Climate Act 2017*. Temuannya menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum iklim bersifat mengikat lintas pemerintahan, pergantian kekuasaan tetap menggeser prioritas kebijakan, terutama di sektor energi dan transportasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji kondisi politik domestik dan dampaknya terhadap kebijakan iklim. Namun, artikel tersebut lebih berfokus pada transisi tata kelola iklim secara umum tanpa menganalisis penerapan *Climate Policy Framework* pada sektor-sektor spesifik, sementara penelitian penulis secara khusus menganalisis bagaimana desain, penerapan, dan tantangan implementasi *Climate Policy Framework* di tiga sektor utama yaitu transportasi, energi, dan industri dalam kerangka pemenuhan target Paris Agreement.

Literatur kedua adalah karya Andreas Malm, Kristoffer Ekber, Christina Englund, Johanne Tagmose Grønkjær, Martin Charlier, Olivia Medin, dan Ståle Holgersen pada tahun 2025 berjudul *Green National Paradox? The Far-Right's Climate Obstruction in Sweden*. Artikel ini menganalisis bagaimana partai sayap kanan *Sweden Democrats (SD)* memanfaatkan citra “negara hijau” Swedia untuk menolak atau menurunkan kebijakan dekarbonisasi baru dengan alasan melindungi

kepentingan ekonomi dan industri domestik. Kesamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap faktor politik domestik yang menurunkan ambisi kebijakan iklim nasional. Namun, kajian Malm dkk. lebih menekankan analisis ideologi dan retorika politik sayap kanan, sedangkan penelitian penulis menganalisis bagaimana dinamika politik tersebut berdampak secara konkret pada kualitas penerapan *Climate Policy Framework* di tingkat sektoral, serta menggunakan kerangka teori rezim internasional, kepatuhan, dan *Ecostate Capacity* untuk menjelaskan tantangan implementasinya.

Literatur ketiga yang juga relevan adalah artikel Karl Lindberg dan Jørgen Wettestad tahun 2024 yang berjudul *European Green Deal and National Climate Leadership: The Swedish Case*. Dengan menggunakan kerangka *Regime Compliance Theory*, mereka menilai sejauh mana kebijakan domestik Swedia konsisten dengan komitmen Uni Eropa dalam *European Green Deal (EGD)*. Hasilnya menunjukkan bahwa Swedia termasuk negara dengan tingkat kepatuhan tinggi terhadap target EGD, tetapi menghadapi tekanan politik dari sektor energi dan fragmentasi koalisi pemerintah. Persamaannya dengan penelitian ini ada pada penggunaan perspektif kepatuhan rezim internasional. Namun, Lindberg dan Wettestad lebih fokus pada hubungan vertikal antara kebijakan Uni Eropa dan implementasi nasional secara umum, sedangkan penelitian penulis secara spesifik menganalisis implementasi *Climate Policy Framework* Swedia pada sektor transportasi, energi, dan industri, serta melihat bagaimana dinamika politik domestik memengaruhi konsistensi penerapan *framework* tersebut lintas pemerintahan.

Literatur keempat adalah *Energy Politics and Climate Leadership Crisis in Sweden* karya Henrik Österblom dan Robert Blasiak pada tahun 2022. Artikel ini memberikan gambaran empiris tentang bagaimana krisis energi, tekanan ekonomi, dan lobi industri fosil mendorong pemerintah menggeser prioritas dari agenda keberlanjutan ke pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Kesamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji hubungan antara tekanan politik-ekonomi dan menurunnya konsistensi kebijakan iklim nasional. Perbedaannya, artikel tersebut lebih menekankan dimensi ekonomi dan politik energi secara luas, sementara penelitian penulis menggunakan *Climate Policy Framework* sebagai unit

analisis utama dan mengkaji bagaimana pergeseran prioritas politik memengaruhi kualitas penerapannya secara sektoral melalui perspektif *Ecostate Capacity* dan teori kepatuhan.

Literatur terakhir adalah artikel Olle Widerberg, Emma Johansson, dan Måns Nilsson tahun 2024 dengan judul *Climate Governance and Policy Integration in Sweden: Between Leadership and Fatigue*. Para penulis membahas fenomena *climate fatigue*, yaitu kejenuhan politik terhadap isu iklim di kalangan pembuat kebijakan, yang membuat komitmen iklim Swedia menurun meskipun negara ini punya reputasi panjang sebagai pelopor kebijakan hijau. Kesamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti kemunduran kepemimpinan iklim Swedia dan kaitannya dengan kondisi politik domestik. Namun, artikel tersebut lebih menonjolkan aspek psikologis dan sosial dari kejenuhan politik terhadap isu iklim, sedangkan penelitian penulis menganalisis konsistensi implementasi *Climate Policy Framework* lintas pemerintahan secara struktural melalui tiga perspektif teori yaitu rezim internasional, *Ecostate Capacity*, dan kepatuhan, dengan fokus pada penerapan di sektor transportasi, energi, dan industri.

Sebagai bentuk penguatan terhadap unsur kebaruan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan 22 karya terdahulu sebagai bahan pembandingan yang disajikan pada tabel berikut:

No	Literatur	Penulis	Teori/Konsep	Bahasan
1	Sweden’s Climate Act – its origin and emergence	Mikael Karlsson (2021)	Penelitian ini menerapkan teori perubahan kebijakan dan kemunculan institusi, terlebih khusus menggarisbawahi tiga konsep utama yaitu: <i>Advocacy Coalition Framework (ACF)</i> , <i>path dependency</i> , <i>punctuated equilibrium</i> , dan	Dalam artikel ini, penulis menelusuri proses politik yang melahirkan <i>Climate Act 2017</i> . Ia menunjukkan undang-undang itu tidak muncul “otomatis” karena citra Swedia sebagai negara hijau. Ia muncul dari tarik-menarik kekuatan politik, institusi, dan

			<i>democratic corporatism</i> di Swedia	masyarakat yang berjalan lama, lalu terkonsolidasi menjadi keputusan formal (Karlsson, 2021).
2	Public support for aviation policy measures in Sweden	Jörgen Larsson, Simon Matti & Jonas Nässén (2020)	Klasifikasi tripartit kebijakan menurut Vedung yang mencakup tiga indikator yaitu <i>Sermons</i> (imbau dan informasi), <i>Carrots</i> (insentif), <i>Sticks</i> (aturan dan sanksi). <i>Value-Belief-Norm</i> (VBN) yang menjelaskan urutan logika dari nilai, keyakinan tentang masalah, lalu norma pribadi, yang akhirnya memicu dukungan atau penolakan kebijakan.	Artikel ini menilai dukungan publik Swedia terhadap kebijakan iklim sektor penerbangan. Penulis menemukan dukungan meningkat saat kebijakan memberi alternatif yang jelas dan terasa adil bagi publik. Dukungan menurun saat kebijakan langsung menaikkan biaya hidup atau terasa memaksa. Artikel ini relevan dengan penelitian karena bisa menjelaskan perubahan kebijakan iklim sebagai respons politik terhadap dukungan dan resistensi publik. (Larsson et al., 2020)
3	The Swedish climate policy framework as a means for climate policy integration: an assessment	Simon Matti, Christer Petersson & Charlotta Söderberg (2021)	Penelitian ini menggunakan konsep <i>Environmental/Climate Policy Integration</i> (E/CPI) yang menekankan penanaman tujuan lingkungan pada semua sektor, bukan menaruhnya hanya pada	Artikel ini menilai apakah <i>Climate Policy Framework</i> Swedia benar-benar mendorong integrasi kebijakan iklim. Penulis menekankan Swedia pernah menghadapi defisit implementasi dan

			<p>kementerian lingkungan. Konsep ini mengevaluasi tiga dimensi termasuk: <i>policy processes, policy outputs, dan policy outcomes</i></p>	<p>pemantauan, lalu CPF hadir untuk memperkuat target jangka panjang dan mekanisme evaluasi. Mereka menilai CPF memberi struktur yang lebih jelas untuk mengikat perhatian lintas sektor, meski tantangan implementasi tetap muncul (Matti et al., 2021b)</p>
4	<p>Green national paradox? How the far right turned Sweden from a (reputed) pioneer of climate mitigation to an obstructor</p>	<p>Andreas Malm, Kristoffer Ekber, Christina Englund, Johanne Tagmose Grønkjær, Martin Charlier, Olivia Medin, dan Ståle Holgersen (2025)</p>	<p>Konsep Green National Paradox menjelaskan pembalikan narasi ketika identitas “pemimpin iklim” dipakai untuk menurunkan kebijakan iklim. Artikel ini merujuk pada climate denialism, obstruction, nasionalisme, serta Exceptionalism & Moral Superpower sebagai gagasan negara merasa unik dan “kekuatan moral” pembalikan kebijakan.</p>	<p>Artikel ini menggambarkan pergeseran politik setelah Pemilu 2022 ketika pengaruh politik sayap kanan menguat. Penulis menunjukkan bentuk penurunan kualitas implementasi kebijakan muncul lewat pembatalan atau pengurangan kebijakan transportasi dan energi, lalu dipaketkan sebagai perlindungan bagi “warga biasa”. Mereka menekankan strategi politik memindahkan konflik dari ranah teknis menjadi ranah identitas dan keadilan versi populis (Malm et al., 2025)</p>

5	<p>Exploring a green Swedish model: Coinciding and contradictory interests on a just climate transformation in Sweden</p>	<p>Jens Ergon, Roger Hildingsson, Mikael Karlsson (2025)</p>	<p>Artikel ini memakai kerangka <i>just transition</i> dengan tiga dimensi: distributif, prosedural, dan pengakuan. Penulis mengaitkannya dengan peran negara dalam mengelola transisi hijau dan konflik kepentingan.</p>	<p>Artikel ini memetakan respons aktor Swedia terhadap pembatalan kebijakan iklim yang terjadi beberapa tahun terakhir. Penulis memakai wawancara untuk melihat posisi bisnis, serikat pekerja, komunitas, dan organisasi lingkungan. Mereka menemukan banyak aktor menuntut kepemimpinan politik yang lebih kuat, tetapi mereka juga membawa kepentingan yang saling bertentangan, terutama soal “pertumbuhan hijau” dan pembatasan ekstraksi sumber daya (Ergon et al., 2025).</p>
6	<p>Compliance in Transition: Facilitative Compliance Finding its Place in the Paris Climate Regime</p>	<p>Meinhard Doelle (2018)</p>	<p>Dalam analisisnya, Doelle menggunakan teori <i>facilitative compliance</i> yang menekankan kepatuhan muncul lewat dukungan, bukan hukuman. Rezim mendorong kepatuhan lewat dialog, transparansi, bantuan teknis, dan penguatan kapasitas</p>	<p>Artikel ini menjelaskan pergeseran rezim iklim dari pendekatan penegakan seperti Kyoto Protocol menuju pendekatan fasilitatif di Paris Agreement. Doelle menekankan hubungan mekanisme kepatuhan dengan sistem transparansi dan evaluasi berkala. Artikel ini relevan dengan penelitian</p>

				karena berkaitan bahwa Swedia tetap “patuh formal”, tetapi politik domestik bisa menurunkan implementasi sehingga performa turun (Doelle, 2018).
7	The effectiveness of soft law in international environmental regimes: participation and compliance in the Hyogo Framework for Action	Maximilian S.T. Wanner (2020)	Secara teoretis, penelitian ini menggunakan kerangka <i>international environmental regime theory</i> dan konsep <i>regime effectiveness</i> , yang melihat rezim sebagai aturan, norma, dan prosedur yang mengoordinasikan perilaku negara. Konsep <i>regime effectiveness</i> menilai apakah rezim menghasilkan perubahan perilaku dan hasil yang relevan.	Artikel ini mengkaji efektivitas <i>Hyogo Framework for Action</i> sebagai contoh <i>soft law</i> . Ia menunjukkan banyak negara aktif berpartisipasi lewat pelaporan dan beberapa meningkatkan implementasi kebijakan, tetapi hasilnya tidak merata antarnegara. Ia menegaskan <i>soft law</i> bisa mendorong komitmen normatif, tetapi tidak selalu menjamin konsistensi (Wanner, 2021).
8	Participation, ambition and compliance: can the Paris Agreement solve the effectiveness trilemma?	Vegard H Tørstad (2020)	Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada konsep “ <i>effectiveness trilemma</i> ” dari Barrett (2008) menuntut keseimbangan antara partisipasi luas, ambisi tinggi, dan kepatuhan. Sistem <i>pledge-and-</i>	Artikel ini menilai Paris berhasil memperluas partisipasi, tetapi tetap menghadapi masalah ambisi dan implementasi. Penulis menekankan peran politik domestik dan kapasitas kebijakan sebagai penghambat utama. Artikel ini relevan

			<p><i>review</i> menjadi cara Paris Agreement mendorong peningkatan ambisi melalui siklus komitmen dan peninjauan.</p>	<p>dengan penelitian karena bisa menjelaskan penurunan performa Swedia sebagai konsekuensi desain rezim yang memberi ruang besar pada politik nasional (Tørstad, 2020).</p>
9	<p>The Desirability of Depoliticization: Compliance in the International Climate Regime</p>	<p>Anna Huggins (2015)</p>	<p><i>Depoliticization</i> mendorong proses kepatuhan berbasis prosedur dan aturan agar tidak mudah ditarik ke kompromi politik. <i>Global Administrative Law</i> (GAL) menekankan transparansi, akuntabilitas, dan due process dalam penilaian kepatuhan.</p>	<p>Artikel ini menunjukkan prosedur teknis tidak pernah sepenuhnya bebas dari kepentingan politik dan diplomasi. Penulis menilai rezim bisa terlihat teknokratis, tetapi aktor tetap bernegosiasi di balik prosedur. Artikel ini relevan dengan penelitian karena Swedia punya institusi iklim yang kuat, namun konflik politik domestik tetap bisa mengubah arah kebijakan (Huggins, 2014).</p>
10	<p>The Role of Non-State Actors in Reviewing Ambition, Implementation, and Compliance under the Paris Agreement</p>	<p>Harro van Asselt (2016)</p>	<p>Artikel ini menekankan peran <i>non-state actors</i> dalam <i>global environmental governance</i> untuk memperkuat <i>transparency and accountability</i>. Aktor non-negara dapat mendukung proses seperti <i>global stocktake</i>,</p>	<p>Artikel ini menjelaskan cara NGO, ilmuwan, sektor privat, dan pemerintah lokal memengaruhi review ambisi dan implementasi Paris Agreement. Penulis menunjukkan aktor non-negara bisa memperkuat akuntabilitas melalui informasi dan</p>

			<i>enhanced transparency framework</i> , dan <i>implementation and compliance mechanism</i> melalui data, pemantauan, dan tekanan publik.	pemantauan. Artikel ini relevan dengan penelitian karena dapat menilai perubahan dukungan atau tekanan aktor domestik non-negara saat konfigurasi politik berubah di Swedia (Van Asselt, 2016)
11	A Bottom-Up Compliance Mechanism for the Paris Agreement	Alexander Zahar (2017)	Perspektif ideologis dalam <i>green politics</i> dan solusi berbasis demokrasi partisipatif. Konsep ini menekankan bahwa transisi iklim berkaitan dengan pilihan ideologi, partisipasi publik, dan arah kebijakan yang menempatkan isu ekologi sebagai agenda politik.	Artikel ini menilai fleksibilitas NDC membuat negara mau ikut, tetapi fleksibilitas itu juga membuka gap antara janji dan tindakan. Zahar menekankan review dan reputasi sebagai alat dorong utama. Artikel ini relevan dengan penelitian karena dapat menilai bagaimana Swedia bisa tetap berada dalam rezim, namun menurunkan ambisi kebijakan domestik yang berpengaruh pada performa indeks (Zahar, 2017).
12	Construing International Climate Change Law as a Compliance Regime	Benoit Mayer (2017)	Mayer memandang hukum iklim internasional sebagai rezim kepatuhan, yaitu sistem yang membangun norma, prosedur, dan ekspektasi perilaku	Mayer menjelaskan bahwa rezim iklim berusaha menutup jarak antara tujuan global dan kebijakan nasional. Ia menilai rezim lebih efektif ketika negara

			<p>negara. Ia menekankan fungsi transparansi dan evaluasi sebagai alat tekanan reputasional. Kerangka ini membantu melihat kepatuhan sebagai proses yang berulang.</p>	<p>menerjemahkan komitmen menjadi kebijakan domestik yang konsisten. Artikel ini relevan dengan penelitian karena dapat menjelaskan penurunan performa sebagai pelemahan kepatuhan substantif, bukan sekadar perubahan status keanggotaan rezim (Mayer, 2018).</p>
13	<p>The greening of European radical left parties: red and green politics</p>	<p>Congcong Wang, Dan Keith (2020)</p>	<p>Studi ini memakai konsep <i>red-green politics</i>, yang melihat hubungan antara agenda keadilan sosial dan agenda lingkungan. Kerangka ini membantu membaca orientasi partai dan strategi elektoral dalam isu iklim. Ia juga membantu menjelaskan potensi konflik antara kebijakan iklim dan isu pekerjaan atau biaya hidup.</p>	<p>Artikel ini menunjukkan partai kiri radikal mengadopsi isu iklim dengan intensitas berbeda, tergantung kompetisi politik, basis pemilih, dan kondisi ekonomi. Penulis menyoroti potensi konflik antara kebijakan iklim, pekerjaan, dan biaya hidup. Artikel ini relevan dengan penelitian karena dapat menjelaskan perubahan ambisi kebijakan iklim sebagai hasil strategi partai dan kompetisi elektoral di Swedia(Wang & Keith, 2020).</p>
14	<p>Kajian Green Politics Theory Dalam Upaya</p>	<p>Yusran, Asnelly Afri (2018)</p>	<p>Penulis memakai <i>Green Politics Theory</i> untuk mengkritik orientasi</p>	<p>Artikel ini membaca krisis ekologi sebagai masalah politik dan</p>

	<p>Menangani Krisis Ekologi Laut Indonesia Terkait Aktifitas Illegal Fishing</p>		<p>kebijakan yang terlalu berpusat pada kepentingan manusia dan ekonomi. Green politics mendorong perspektif ekologis dan menuntut reformasi institusi serta tata kelola. Kerangka ini membantu membedakan kebijakan “pro-lingkungan” yang teknis dari perubahan politik yang lebih mendasar.</p>	<p>institusional, bukan semata masalah teknis. Walau kasusnya Indonesia, penulis memberi penjelasan konsep <i>green politics</i> yang jelas untuk dipakai sebagai rujukan teori. Artikel ini relevan dengan penelitian karena penelitian ini membutuhkan dasar konsep green politics untuk menjelaskan perubahan orientasi kebijakan iklim Swedia ketika politik domestik berubah (Yusran & Asnelly, 2018)</p>
15	<p>Global Justice’s Critics of Green Politics Theory Towards International Rules of Climate Change</p>	<p>Arum Tri Utami (2023)</p>	<p>Utami membahas hubungan <i>green politics</i> dan <i>global justice</i> dalam aturan iklim internasional. Global justice menekankan pembagian tanggung jawab yang adil, terutama bagi negara maju yang punya kontribusi historis emisi.</p>	<p>Artikel ini menyoroti ketegangan antara perubahan dari bawah yang ditekankan green politics dan kebutuhan peran negara yang ditekankan global justice. Penulis menilai aturan iklim tetap membutuhkan negara untuk menjalankan kewajiban dan pendanaan. Artikel ini relevan dengan penelitian karena Swedia sering mengklaim kepemimpinan normatif,</p>

				sehingga penurunan konsistensi kebijakan domestik dapat menurunkan posisi moral dan reputasionalnya (Utami, 2023).
16	Cultural policies and urban transitions green politics, democracy in the time of the pandemic	Emmanuel Négrier (2023)	Négrier memakai konsep hibridisasi paradigma, yaitu percampuran paradigma kebijakan lama dan baru. Ia menempatkan green politics sebagai paradigma yang masuk melalui nilai ekologi dan demokrasi lokal. Kerangka ini membantu menjelaskan perubahan kebijakan sebagai proses negosiasi, bukan perubahan total sekaligus.	Artikel ini menunjukkan krisis seperti pandemi dapat mengubah prioritas kebijakan dan cara kerja institusi. Penulis menekankan transisi hijau di level kota membutuhkan legitimasi dan partisipasi, tetapi krisis dapat mengganggu atau mengubah proses tersebut (Négrier, 2023).
17	Environmentalism dan Green Politics: Pembahasan Teoretis	Yeni Sri Lestari (2018)	Lestari membedakan <i>environmentalism</i> sebagai gerakan yang fokus pada perlindungan lingkungan, dan <i>green politics</i> sebagai ideologi politik yang menuntut perubahan institusi, ekonomi, dan relasi kekuasaan. Ia juga mengaitkan green politics dengan kritik	Artikel ini menelusuri perkembangan pemikiran lingkungan dari kesadaran sosial menjadi agenda politik. Lestari menjelaskan bagaimana isu lingkungan masuk ke kebijakan negara melalui gerakan sosial dan pembentukan agenda (Lestari, 2018).

			terhadap pembangunan eksploitatif.	
18	A Climate Backlash: Comparing Populist Parties' Climate Policies in Denmark, Finland, and Sweden	Antto Vihma, Gunilla Reisch, Astrid Nonbo Andersen (2021)	Artikel ini memakai konsep <i>climate backlash</i> , yaitu reaksi balik politik terhadap kebijakan iklim. Penulis mengembangkan tipologi penolakan populis, misalnya lewat nasionalisme kebijakan dan penolakan biaya kebijakan. Kerangka ini membantu mengklasifikasikan strategi partai, bukan sekadar label “anti-iklim”.	Artikel ini membandingkan posisi partai populis di Denmark, Finlandia, dan Swedia terhadap kebijakan iklim. Untuk Swedia, penulis menunjukkan bahwa oposisi sering fokus pada kebijakan domestik yang dianggap mahal atau tidak adil bagi publik tertentu. Narasi “elit hijau” versus “warga biasa” sering muncul dalam framing kebijakan (Vihma et al., 2021).
19	Climate politics in small European states	Neil Carter, Conor Little, Diarmuid Torney (2019)	Tulisan ini mengacu pada dua teori utama yaitu <i>Small-State Theory</i> (Peter Katzenstein, 1985) di mana negara-negara kecil memiliki perekonomian yang sangat terbuka, rentan terhadap tekanan eksternal, dan sering kali berorientasi pada konsensus dalam politik dalam negeri.	Artikel ini menunjukkan negara kecil tetap bisa memimpin politik iklim melalui diplomasi dan inovasi kebijakan, tetapi kepemimpinan bergantung pada dukungan domestik dan konsistensi kebijakan. Artikel ini relevan dengan penelitian karena dapat menghubungkan reputasi Swedia sebagai pelopor dengan kebutuhan konsistensi domestik, lalu menjelaskan penurunan

				performa sebagai gangguan atas strategi kepemimpinan itu (Carter et al., 2019).
20	Sweden: Much Progress but More Is Needed!	Gunilla Herolf (2023)	Herolf memakai pendekatan evaluasi kinerja kebijakan yang menilai hubungan target, instrumen kebijakan, dan tren emisi aktual. Kerangka ini menyoroti gap implementasi.	Bab ini menilai Swedia telah mencatat kemajuan, tetapi masih membutuhkan kebijakan tambahan untuk mencapai target jangka panjang. Penulis menekankan sektor tertentu tetap sulit menurunkan emisi dan membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan (Herolf, 2023).
21	Science advice and policy influence: Views of practitioners in the Swedish Climate Policy Council	Linnéa Aarthun, Göran Sundqvist (2025)	Artikel ini memakai kerangka science-policy interaction dan knowledge utilization untuk menilai bagaimana pemerintah memakai masukan ilmiah. Kerangka ini membantu mengevaluasi peran lembaga penasihat seperti Climate Policy Council.	Artikel ini menunjukkan saran ilmiah tidak otomatis memengaruhi keputusan, karena keputusan tetap mengikuti kalkulasi politik, timing, dan prioritas pemerintah. Penulis menekankan peran desain kelembagaan, akses, dan dukungan politik dalam menentukan pengaruh lembaga penasihat. Artikel ini relevan dengan penelitian karena dapat menilai apakah perubahan koalisi membuat pemerintah mengabaikan

				rekomendasi ilmiah, lalu menurunkan konsistensi kebijakan iklim (Aarthun & Sundqvist, 2025).
22	The development- alisation of climate mobilities policy in Denmark and Sweden	Sarah Louise Nash (2024)	Artikel ini menggunakan teori <i>migration– development nexus theory</i> , teori sekuritisasi, dan konsep developmentalisasi untuk menjelaskan bagaimana Denmark dan Swedia membingkai mobilitas terkait iklim sebagai isu pembangunan, alih-alih isu migrasi.	Artikel ini membahas bagaimana Denmark dan Swedia membahas mobilitas terkait iklim dan memilih framing kebijakan tertentu untuk mengelola sensitivitas politik. Penulis menunjukkan <i>framing</i> dapat memindahkan isu dari arena yang kontroversial ke arena yang lebih aman secara politik. Artikel ini relevan dengan penelitian karena bisa menunjukkan bahwa pemerintah dapat mengubah bahasa dan arena kebijakan iklim untuk menyesuaikan tekanan politik domestik, yang akhirnya memengaruhi arah kebijakan dan performa (Nash, 2024).

Tabel 2.1.

Dari tinjauan terhadap 22 literatur perbandingan, tidak ada yang memiliki kesamaan total baik dari segi teori, konsep, maupun temuan empiris.